

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kesimpulan dari hasil penelitian mengenai partisipasi politik Penyandang Disabilitas yang di wadahi oleh SIGAB dan faktor yang mempengaruhi Penyandang Disabilitas dalam Pemilukada Kota Yogyakarta tahun 2017, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikkut :

1. Dalam partisipasi politik Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta tahun 2017 terbagi menjadi tiga tahapan. Pra Pemiliha, hari H Pemilihan, dan Pasca Pemilihan. Pertama, pada saat kegiatan *Pra* Pemilihan, dalam kegiatan pemilihan ini KPU Kota Yogyakarta melakukan kegiatan Konvesional dibuktikan dengan cara melakukan kegiatan menghubungi semua komunitas seperti SIGAB maupun organisasi Difabel lainnya HWDI, GERKATIN dalam rangka untuk memastikan pendataan jumlah DPS yang nantinya akan di masukkan ke dalam DPT. Jauh sebelum kegiatan itu dilakukan KPUD mengadakan sosialisasi kepada disabilitas tentang Pemilukada. Dalam sosialisasi ini langkah langkah yang dilakukan KPU dalam memberikan penerangan tentang Pilkada sudah dirasa cukup baik bagi penyandang disabilitas dalam menginformasikan pilkada ke penyandang disabilitas, khususnya yang tergabung di dalam lembaga SIGAB. Karena ini merupakan kewajiban KPU dalam pemenuhan Hak Disabilitas. Setelah itu menghubungi oraganisasi Difabel kemudian pihak

penyelenggara melakukan diskusi serta program untuk penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi. Kemudian dalam hal ini KPU Kota Yogyakarta mensosialisasikan tentang pemilu dengan mengundang kelompok-kelompok Disabilitas untuk hadir di KPU guna mengetahui program serta visi dan misi yang diusung oleh calon dalam Pemilihan Kota Yogyakarta tahun 2017. Maka dalam hal ini yang dilakukan oleh KPU sendiri serta feedback dari penyandang Disabilitas di dalam penelitian ini sudah sesuai dengan teori *Konvensional* yang dikemukakan oleh *A. Almond Gabriel*. Akan tetapi informasi tentang visi dan misi yang diberikan KPU kepada penyandang disabilitas yang diwadahi oleh SIGAB menurutnya belum merata. Sebab, kebutuhan masing-masing disabilitas berbeda, seperti Tuna Rungu yang kurang akses informasi dari pengenalan calon sampai pada proses pendidikan politik. Dalam pengundangan tersebut KPU Kota Yogyakarta mengundang organisasi penggiat Disabilitas dalam rangka mensosialisasikan tentang Pemilihan ke Penyandang Disabilitas, seperti SIGAB, Narasita dan SABDA.

Dalam hal mensosialisasikan tentang Pemilihan kepada Penyandang Disabilitas, organisasi-organisasi penggiat Disabilitas ini bekerjasama dengan mahasiswa untuk masuk ke kelurahan-kelurahan yang bertujuan memberikan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas, namun yang terjadi masih banyak penyandang disabilitas yang tidak tergabung di dalam organisasi mengetahui proses sosialisasi itu. Setelah proses sosialisasi selesai, KPU mengadakan simulasi serentak di 14

Kecamatan sebelum masa tenang berlangsung, kegiatan ini berguna untuk memastikan kesiapan penyelenggara Pemilu masing-masing KPPS agar benar benar siap dalam memfasilitasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilukada yang di gelar pada H. Didalam kegiatan simulasi serentak ini KPU mendapatkan masukan serta saran dari KPPS maupun dari Penyandang Disabilitas untuk fasilitas yang masih dirasa kurang, tentu itu sebagai masukan untuk KPU untuk mempersiapkan lebih baik pada saat hari Pemilihan.

Kedua, adalah partisipasi di hari H, pada saat pelaksanaan pada hari H fasilitas serta aksesibilitas sudah terlihat baik untuk sebagian TPS namun ada beberapa TPS yang masih kurang akses terhadap penyandang disabilitas. Dan penyediaan pendamping di TPS dirasa kurang, khususnya untuk Penyandang Disabilitas Tuna Rungu dan Tuna Netra. Walaupun Tuna Netra disini surat suaranya sudah berupa dreile. Akan tetapi pendamping untuk menuju tempat TPS perlu pemerataan, begitu pula dengan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu yang membutuhka visual dari pada audio pada saat giliran pencoblosan.

Terakhir *Pasca* Pemilu. Dalam Pasca Pemilu ini ternyata partisipasi dari dari penyandang disabilitas masih kurang, hal ini di buktikan dengan dari total 837 pemilih yang terdaftar di DPT, yang menggunakan hak suaranya hanya 347 orang saja di Kota Yogyakarta. Disini dapat di simpulkan bahwa animo penyandang disabilitas masih rendah, fenomena ini juga di amini oleh narasumber yang di tunjuk SIGAB terlibat di dalam

penelitian ini, menurut mereka ini di karenakan masih belum meratanya implementasi dari kebijakan KPU di setiap TPS serta masih kurang meluasnya informasi yang diberikan ke KPU kepada Penyandang Disabilitas tentang Pemilu. Dapat disimpulkan bahwasannya partisipasi untuk penyandang Disabilitas Tuna Netra tergolong Aktif, hal ini dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber Tuna Netra karena mereka ikut terlibat dari mulai proses sosialisasi sampai dengan hari pemilihan. Akan tetapi berbeda dengan bentuk partisipasi yang di dapat dari penelitian ini untuk penyandang Disabilitas Tuna Rungu Wicara dan Tuna Daksa yang mana bentuk partisipasinya itu tergolong Apatis. Bentuk partisipasi yang apatis di karenakan sikap tertekan atau ketidak perdulian terhadap pentingnya partisipasi. Tentunya ini karena kurang kepercayaan Penyandang Disabilitas terhadap fasilitas mereka di TPS itu sendiri.

2. Faktor yang mempengaruhi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Kota Yogyakarta tahun 2017 ada dua yaitu, pertama Apresiasi terhadap Pemerintah. Hal ini merupakan faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi. Menurut pernyataan dari ke tiga narasumber, dalam hal ini Penyandang Disabilitas masih kurang puas terhadap kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta yang dirasa kurang memberikan sebuah keuntungan bagi Penyandang Disabilitas sehingga memunculkan ketidak perdulian mereka terhadap pentingnya partisipasi itu sendiri. Dapat di ketahui bahwasannya dari DPT 837 Disabilitas yang ikut berpartisipasi hanya mencapai 40,62% saja yang ikut berpartisipasi, artinya animo

partisipasi rendah. Penyebabnya adalah sarana transportasi umum, kesehatan, pekerjaan serta pendidikan. Lapangan pekerjaan yang sangat sedikit terbuka untuk penyandang disabilitas ini merupakan penyebab utama rendahnya partisipasi mereka dalam Pemilu. Lalu, pelayanan kesehatan juga merupakan salah satu faktor rendahnya keinginan Penyandang Disabilitas ini dalam berpartisipasi, karena mereka berfikir sebuah partisipasi itu tidak perlu karena sampai sekarang pemerataan implementasi program yang menguntungkan dari pihak pemerintah kepada Penyandang Disabilitas ini belum dirasakan. Yang *kedua*, adalah kesadaran Politik Penyandang Disabilitas rendah dikarenakan faktor bahwasannya hak mereka masih belum terpenuhi, seperti hak dalam perlindungan hukum, hak-hak ekonomi, dan hak politik. Disini pemenuhan hak politik bagi Penyandang Disabilitas masih di kesampingkan. Terbukti dengan sarana dan prasarana yang digunakan di masing- masing TPS dalam Pemilu Kota Yogyakarta kemarin. Karena belum meratanya kesiapan penyelenggara di kecamatan yaitu di KPPS tertentu yang dinilai belum berpihak pada Penyandang Disabilitas. Dalam hal ini menimbulkan persepsi Penyandang Disabilitas untuk turut berpartisipasi.

## **4.2. Saran**

### **4.2.1. Komisi Pemilihan Umum**

1. KPU kota Yogyakarta harus melakukan pendataan ulang serta memastikan terhadap jumlah Penyandang Disabilitas di kota Yogyakarta tahun 2017.

2. Yang kedua adalah KPU Kota Yogyakarta sendiri harus lebih meluas dalam mensosialisasikan setiap Pemilihan Umum, tidak hanya Pemilukada saja tentunya. Hal ini bertujuan agar Penyandang Disabilitas mengetahui tentang visi dan misi calon dalam Pemilukada dengan baik.
3. KPU Kota Yogyakarta diharapkan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses sosialisasi sehingga dapat meningkatkan kualitas sosialisasi politik.
4. KPU dalam simulasi serentak yang diadakan, akan lebih baik apabila dalam kegiatan simulasi Pemilukada dapat di pastikan kesiapan penyelenggara KPPS di setiap TPS dalam memfasilitasi serta menciptakan ruang yang akses terhadap Penyandang Disabilitas. Karena tempat yang akses merupakan anggapan bahwa Penyandang Disabilitas ini memang di anggaap.
5. Diharapkan di setiap TPS yang ada Penyandang Disabilitas Tuli agar tidak mengedepankan audio saja di TPS tetapi harus menyediakan Visual agar mereka tahu giliran dalam pemungutan suara.

#### **4.2.2. SIGAB**

Untuk SIGAB terus maju dan lebih banyak memberikan pendidikan politik kepada Penyandang Disabilitas ini agar bisa meratanya pemahaman tentang pentingnya berpartisipasi serta hak suara mereka, dan terus maju dalam menyuarkan hak-hak Penyandang Disabilitas.

### **4.2.3. Penyandang Disabilitas**

1. Masyarakat Penyandang Disabilitas diharapkan menjadi lebih peka dan membuka diri tanpa harus merasa berbeda dari masyarakat yang normal. Hal ini akan mengakibatkan kecenderungan menutup diri dari lingkungan luar.
2. Masyarakat Penyandang Disabilitas diharapkan lebih meningkatkan kemampuan seperti pendidikan agar berguna bagi kehidupan mendatang, menjadi mandiri tanpa tergantung pada orang lain.